

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Tingkat UAKPA (Audited)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Swastiko Purnomo

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran	43





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG

Jalan Raya Serang-Cilegon Km. 3, Legog, Serang 42162
Telepon: (0254) 201999, 216361; Faksimile: (0254) 216331

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serang, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Swastiko Purnomo



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.888.518.967,- atau mencapai 282,25 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp7.400.683.000.

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.604.578.054,- atau mencapai 86,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.025.837.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.306.671.432,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp471.727.750; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.834.943.682; dan Aset Lainnya (neto) sebesar 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp374.386.491,- dan Rp17.932.284.941,-.



3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.031.760.362 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp3.073.976.034 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.957.784.328. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp16.957.784.328.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp19.136.360.175 dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(18.161.859.562) dan ditambah Surplus-LO sebesar Rp16.957.784.328 sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp17.932.284.941.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Triwulan IV TA 2025		% thd Angg	Triwulan IV TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.400.683.000	20.888.518.967	282,25	6.930.033.811
JUMLAH PENDAPATAN		7.400.683.000	20.888.518.967	282,25	6.930.033.811
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	2.889.805.000	2.512.580.315		2.509.235.752
Belanja Modal	B.5	136.032.000	91.997.739		750.072.830
JUMLAH BELANJA		3.025.837.000	2.604.578.054	86,08	3.259.308.582

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN TA 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember TA 2025	31 Desember TA 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	59.995.265,00	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	372.660.991	13.641.277.501
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	120.000	916.873.870
Persediaan	C.6	38.951.494	53.196.675
Jumlah Aset Lancar		471.727.750	14.611.348.046
ASET TETAP			
Tanah	C.8	10.200.000.000	10.200.000.000
Peralatan dan Mesin	C.9	5.047.949.778	4.845.576.339
Gedung dan Bangunan	C.10	8.020.872.402	8.020.872.402
Aset Tetap Lainnya	C.11	13.580.000	13.580.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.12	(5.447.458.498)	(4.899.275.460)
Jumlah Aset Tetap		17.834.943.682	18.180.753.281
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.13	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		18.306.671.432,00	32.792.101.327,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	374.386.491,00	13.655.741.152,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.16	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		374.386.491,00	13.655.741.152,00
JUMLAH KEWAJIBAN		374.386.491,00	13.655.741.152,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	17.932.284.941,00	19.136.360.175,00
JUMLAH EKUITAS		17.932.284.941,00	19.136.360.175,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.306.671.432,00	32.792.101.327,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	20.031.760.362	7.703.297.320
JUMLAH PENDAPATAN		20.031.760.362	7.703.297.320
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	85.868.476	71.340.650
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.394.942.824	1.297.008.719
Beban Pemeliharaan	D.4	635.638.422	771.718.432
Beban Perjalanan Dinas	D.5	409.343.274	388.362.722
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	548.183.038	511.115.384
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.7	-	-
JUMLAH BEBAN		3.073.976.034	3.039.545.907
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		16.957.784.328	4.663.751.413
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		-	139.146.789
Surplus/Defisit kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	139.146.789
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		16.957.784.328	4.802.898.202
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		16.957.784.328	4.802.898.202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024
EKUITAS AWAL	E.1	19.136.360.175,00	17.958.428.452,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	16.957.784.328	4.802.898.202
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas			-
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4		-
Lain-lain			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	(18.161.859.562)	(3.624.966.479)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.204.075.234)	1.177.931.723
EKUITAS AKHIR	E.11	17.932.284.941,00	19.136.360.175,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2.1 Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

Renstra merupakan suatu proses manajerial yang berorientasi pada pencapaian kinerja selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Renstra KPKNL Serang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2025. Dengan bersumber pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2020 - 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang menyusun perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis



program sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra DJKN tahun 2020 - 2025. Program yang tertuang dalam KPKNL Serang pada tahun 2020 - 2025 adalah Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang.

A.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

KPKNL Serang berlokasi di Kota Serang, tepatnya di Jalan Raya Serang Cilegon Km. 3, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten dan sebagai pusat budaya Sunda Banten dan Jawa Serang. Dalam kesehariannya, penduduk di kota Serang menuturkan Bahasa Sunda Banten dan Bahasa Jawa Serang. Di kota ini terdapat sisa-sisa peninggalan bangunan bersejarah dari masa kejayaan Kesultanan Banten. Kota Serang mempunyai moto atau semboyan 'Kota Serang Madani'. Secara filosofis, Madani merupakan bentuk kemandirian suatu daerah. Madani memberikan arti luas untuk pengayoman masyarakat, civil society yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta berbudaya. KPKNL Serang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara,
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
6. Pelaksanaan pelayanan lelang.
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengelolaan piutang negara dan lelang.
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

A.2.4. Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Serang berpegang teguh pada Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu :

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

A.2.5. Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Serang menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.2.6. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani bidang pengelolaan

piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang mempunyai peran cukup strategis sebagai berikut:

1. memenuhi target penerimaan negara bukan pajak dari pengurusan negara dan lelang;
2. membina, mengelola, menatausahakan, dan mengamankan aset negara berupa barang jaminan;
3. menyajikan dan melaporkan perkembangan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara;
4. meningkatkan citra pengurusan piutang negara dan lelang;

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara* adalah sebagai berikut:
 - *Pendapatan Negara Bukan Pajak.*
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang

timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual*

direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang telah melakukan sebanyak 8 (delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya penyesuaian kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan, serta adanya kebijakan dari kantor pusat yang mengakibatkan perubahan anggaran.

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.400.683.000	7.400.683.000
Jumlah Pendapatan	7.400.683.000	7.400.683.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.780.305.000	2.889.805.000
Belanja Modal	96.016.000	136.032.000
Jumlah Beban	2.876.321.000	3.025.837.000

Realisasi
Pendapatan
Rp20.887.499.482,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.887.499.482,- atau mencapai 282% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 7.400.683.000,-. Pendapatan di lingkup KPKNL Serang berasal dari tugas dan fungsi KPKNL Serang.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Triwulan IV TA 2025

Uraian	TRW IV TA.2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Bunga, Peng Rek Bank			
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	6.511.861.000	20.245.212.704	310,90
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	840.240.000	531.838.462	63,30
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	48.582.000	110.448.316	227,34
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Anggaran Lain-lain		1.019.485	
Total Pendapatan Kotor	7.400.683.000	20.888.518.967	282,25
Pengembalian Pendapatan	-	-	



Secara keseluruhan terjadi peningkatan realisasi pendapatan dari Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 201,29%. Hal ini disebabkan karena Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan BMN pada Triwulan IV TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 207,45% dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV TA 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Trimester IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	Trw IV TA 2025	Trw IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Bunga, Peng Rek Bank	-	139.146.789	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	137.110.789	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.036.000	(100,00)
Pendapatan Bunga, Peng Rek Bank	20.887.499.482	6.793.782.875	207,45
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	20.245.212.704	5.333.774.591	279,57
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	531.838.462	819.866.572	(35,13)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	110.448.316	640.141.712	(82,75)
Pendapatan Lain-Lain	1.019.485	11.469	8.789,05
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.019.485	11.469	8.789,05
Total Pendapatan Kotor	20.888.518.967	6.932.941.133	201,29
Pengembalian Pendapatan	-	-	
Jumlah	20.888.518.967	6.932.941.133	201,29

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.604.578.054

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Lingkup KPKNL Serang pada Triwulan IV TA 2025 adalah sebesar Rp2.604.578.054,- atau 86% dari anggaran belanja sebesar Rp2.833.304.000,-. Terdapat pagu blokir sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai dengan Kebijakan Kantor Pusat DJKN. Rincian anggaran dan realisasi belanja Triwulan IV TA 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2025

Uraian	Trw IV TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	2.889.805.000	2.512.580.315	86,95
Belanja Modal	136.032.000	91.997.739	67,63
Total Belanja Kotor	3.025.837.000	2.604.578.054	86,08
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	3.025.837.000	2.604.578.054	86,08

Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,16% dibandingkan realisasi belanja pada Triwulan IV TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 81,86%.

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	Trw IV TA 2025	Trw IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	2.512.580.315	2.509.235.752	0,13
Belanja Modal	91.997.739	750.072.830	(87,73)
Total Belanja Kotor	2.604.578.054	3.259.308.582	(20,09)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	2.604.578.054	3.259.308.582	(20,09)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0

Tidak ada realisasi Belanja Pegawai KPKNL Serang pada Triwulan IV TA 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya sentralisasi Belanja Pegawai oleh Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai TRW IV . TA 2025 dan 2024

URAIAN	Trw IV TA 2025	Trw IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Barang
Rp 2.512.580.315,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Triwulan IV TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.512.580.315,- dan Rp2.509.235.752,-.

Realisasi Belanja Barang Triwulan IV TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,13% dibandingkan realisasi Belanja Barang Triwulan IV TA 2024. Pada Tahun 2024, Belanja Jasa yang terdiri dari Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon dilaksanakan secara sentralisasi menggunakan DIPA Kantor Pusat DJKN Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.5/2024

tentang Pelaksanaan Piloting Pembayaran Belanja Jasa Listrik dan Belanja Jasa Telekomunikasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah Kementerian/Lembaga.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	REL.Trw IV TA 2025	REL.Trw IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.131.875.138	912.999.275	23,97
Belanja Barang Non Operasional	264.100.186	205.710.586	28,38
Belanja Barang Persediaan	71.623.295	56.639.460	26,45
Belanja Jasa	-	173.805.277	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	635.638.422	771.718.432	(17,63)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	409.343.274	388.362.722	5,40
Jumlah Belanja Kotor			-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.512.580.315	2.509.235.752	0,13

Belanja Modal
Tanah Rp0.

B.4.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal berupa Tanah pada Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REL.Trw IV TA 2025	REL.Trw IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp91.997.739,-.

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91.997.739,- dan Rp750.072.830,-. Tahun 2024 Belanja Modal KPKNL Serang hanya terdiri dari:

1. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 unit;
2. AC Split 2 pk sebanyak 4 unit;
3. Alat penghancur kertas sebanyak 1 unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	REL.TRW IV TA 2025	REL.TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.997.739	750.072.830	(87,73)
Jumlah Belanja Kotor	91.997.739	750.072.830	(87,73)
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	91.997.739	750.072.830	-87,73

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REL.TRW IV TA 2025	REL.TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Kas tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Tidak terdapat saldo kas pada akhir 2025 karena seluruh belanja telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TRW IV TA 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp59.995.265,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp59.995.265,- dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp59.995.265,- yaitu bea lelang yang disetorkan bendahara tgl 2 Januari 2026 yang terdiri atas:

1. Bea Lelang atas Lelang Non Eksekusi Wajib Selain BMN/D PDAM Tirta Albantani Kab. Serang RL366/06.01/2025-01 Tgl. 22 Desember 2025 sebesar Rp5.676.320,-
2. Bea Lelang Penjual atas Lelang Eksekusi Sitaan Kepolisian Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus RL369/06.01/2025-01 Tgl. 22 Desember 2025 sebesar Rp54.438.945,-



Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TRW IV TA 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	59.995.265	-
Jumlah	59.995.265	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp372.660.991,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp372.660.991,- dan Rp13.641.277.501,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas dimaksud antara lain terdiri dari:

1. Hasil bersih Lelang yang belum diserahkan kepada Penjual sebesar Rp136.306.240,-
2. Uang Jaminan Lelang yang belum diambil sebesar Rp235.244.750,-
3. E-materai yang belum dibayarkan sebesar Rp1.110.000,-
4. Lain-lain di piutang yaitu berupa saldo di Rekening Piutang Negara sebesar Rp1.
5. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TRW IV TA 2025	TA 2024
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	372.660.991,00	13.641.277.501,00
Jumlah	372.660.991,00	13.641.277.501,00

C.4 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Di Muka

Jenis	TRW VI TA 2025	TA 2024
Belanja dibayar dimuka	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp120.000,-

C.5 Pendapatan yang masih harus diterima

Saldo pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp120.000,- dan Rp916.873.870. Pendapatan Bea Lelang yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang masih harus diterima dari pihak ketiga. Adapun pendapatan dimaksud berasal dari Risalah Lelang Nomor RL 366/06.01/2025-01. Rincian Beban Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Pendapatan yang masih harus diterima	120.000	916.873.870
Total		0	0

Persediaan
Rp38.951.494,-

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp38.951.494,- dan Rp53.196.675,-

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TRW IV TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	38.951.494	53.196.675
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	38.951.494	53.196.675

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp10.200.000.000,-

C.8 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.200.000.000. Tidak ada penambahan atau pengurangan Tanah sampai periode Triwulan IV Tahun 2025.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	10.200.000.000
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	10.200.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	10.200.000.000

Peralatan dan Mesin
Rp5.047.949.778,-

C.9 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.047.949.778,- dan Rp4.845.576.339,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	4.845.576.339
Mutasi tambah:	Rp	202.373.439
Mutasi kurang:		-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	5.047.949.778
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	(4.131.636.677)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	916.313.101

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berasal dari:

1. Pembelian AC Split 2 PK sebanyak 4 unit;
2. Pembelian Alat Penghancur Kertas sebanyak 1 unit; dan
3. Pembelian Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) sebanyak 2 unit.

Rincian asset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp8.020.872.402,-*

C.10 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp8.020.872.402,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	8.020.872.402
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Penghentian dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.020.872.402
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.315.821.821)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.705.050.581

Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp13.580.000,-*

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya ini berupa Aset Tetap Renovasi dan Bahan Perpustakaan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp13.580.000. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	13.580.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Pengurangan	-
Saldo per 31 Desember 2025	13.580.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.580.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp5.447.458.498,-.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp5.447.458.498,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	Rp 10.200.000.000	Rp -	Rp 10.200.000.000
Peralatan dan Mesin	Rp 5.047.949.778	Rp (4.131.636.677)	Rp 916.313.101
Gedung dan Bangunan	Rp 8.020.872.402	Rp (1.315.821.821)	Rp 6.705.050.581
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Tetap dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp 13.580.000	Rp -	Rp 13.580.000
Aset Tetap yang tdk digunakan	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp 23.282.402.180	Rp (5.447.458.498)	Rp 17.834.943.682

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	-
Mutasi kurang:	
- Usulan Barang RB ke Pengelola	-
- Penghapusan BMN	-
- Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp374,386.491,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp374,386.491,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga terdiri atas:

A. Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu:

1. Biaya langgganan pos yang belum dibayar sebesar Rp1.725.500,-

B. Dana Pihak Ketiga yaitu:

1. Hasil bersih Lelang yang belum diserahkan kepada Penjual sebesar Rp136.306.240,-
2. Uang Jaminan Lelang yang belum diambil sebesar Rp235.244.750,-
3. E-materai yang belum dibayarkan sebesar Rp1.110.000,-
4. Lain-lain di piutang yaitu berupa saldo di Rekening Piutang Negara sebesar Rp1.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	Rp 1.725.500
2	Dana Pihak Ketiga	Rp 372.660.991
3	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp -
4	Uang Muka dari KPPN	Rp -
Total		Rp 374.386.491

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0,-

C.16 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan Tagihan BAST/Kuitansi/SPBy yang sudah diinput ke SAKTI namun belum dibuatkan SPP sampai dengan periode pelaporan. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada KPKNL Serang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

No	Uraian	Jumlah
	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp -
Total		Rp -

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk KPKNL Serang adalah sebagai berikut:

Uraian	per 31 Desember 2025
Uang Muka KPPN	-
Jumlah	-

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada KPKNL Serang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0
Total		0

Ekuitas
Rp17.959.856.483,-

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.932.284.941,- dan Rp19.136.360.175,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp20.031.760.362,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.031.760.362,- dan Rp7.703.297.320,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp19.388.454.099,-
2. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Rp 531.838.462,-
3. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Rp110.448.316,-
4. Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp1.019.485,-

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	TRW IV TA. 2025	TRW IV TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan bukan pajak lainnya	20.031.760.362	7.703.297.320	160,04
Jumlah	20.031.760.362	7.703.297.320	160,04

Pendapatan bukan pajak lainnya pada Triwulan IV TA 2025 mengalami peningkatan 160%% dibandingkan Triwulan IV TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya meningkatnya Pendapatan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I pada Triwulan IV TA 2025.

Beban Persediaan
Rp85.868.476,-

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.868.476,- dan Rp71.340.650,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Persediaan Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	85.868.476	71.340.650	20,36
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	85.868.476	71.340.650	20,36

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.394.942.824,-*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.394.942.824,- dan Rp1.297.008.719,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas Barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Selama periode Tahun 2025, tidak ada Beban Langganan Listrik dan Telepon Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.5/2024 tentang Pelaksanaan Piloting Pembayaran Belanja Jasa Listrik dan Belanja Jasa Telekomunikasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah Kementerian/Lembaga. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	921.532.036	825.335.232	11,66
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	78.993.002	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos F	26.637.600	21.469.543	24,07
Beban Honor Operasional Satuan Ke	103.680.000	68.472.000	51,42
Beban Bahan	150.201.036	90.853.086	65,32
Beban Barang Non Operasional Lainr	113.899.150	114.857.500	(0,83)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrak	-	3.440.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	-	152.845.664	(100,00)
Beban Langganan Telepon	-	19.735.694	(100,00)
Jumlah	1.394.942.824	1.297.008.719	7,55

*Beban
Pemeliharaan
Rp635.638.422,-*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp635.638.422,- dan Rp771.718.432,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Triwulan IV TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	338.753.388	409.319.822	(17,24)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.885.034	362.398.610	(18,08)
Jumlah	635.638.422	771.718.432	(17,63)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp409.343.274,-*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode s.d. Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp409.343.274,- dan Rp388.362.722,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	371.029.274	343.794.722	7,92
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.314.000	44.568.000	(14,03)
Jumlah	409.343.274	388.362.722	5,40

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp548.183.038,-*

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan IV TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp548.183.038,- dan Rp511.115.384,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun Triwulan IV TA.2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	373.759.510	336.691.856	11,01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.423.528	174.423.528	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	548.183.038	511.115.384	7,25
			-
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	548.183.038	511.115.384	7,25

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp0,-*

D.8 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Triwulan IV TA 2025 dan 2024

URAIAN	TRW IV TA 2025	TRW IV TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	139.146.789	-100%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Opr.Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	139.146.789	-100,00%

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Triwulan IV Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp19.136.360.175

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.136.360.175,- dan Rp17.958.428.452,-.

Surplus(defisit) LO

Rp16.957.784.328,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp16.957.784.328,- dan Rp4.802.898.202,-. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp0*

E.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi mencerminkan koreksi atas nilai aset tetap yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar Entitas

Rp(18.161.859.562)

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (18.161.859.562) dan (3.624.966.479) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksasi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	2.604.578.054
Diterima dari entitas lain	- 20.888.518.967
Transfer Keluar	11.705.651
Transfer Masuk	110.375.700
Jumlah	(18.161.859.562)



Ekuitas Akhir

Rp17.932.284.941,-

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.932.284.941,- dan Rp19.136.360.175,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan Lain-lain setelah tanggal neraca.





2025

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang
Periode sampai dengan 31 Desember 2025 (Audited)



LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (119724) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SERANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:33 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,031,760,362	7,703,297,320	12,328,463,042	160.041
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,031,760,362	7,703,297,320	12,328,463,042	160.041
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	20,031,760,362	7,703,297,320	12,328,463,042	160.041
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	85,868,476	71,340,650	14,527,826	20.364
Beban Barang dan Jasa	1,394,942,824	1,297,008,719	97,934,105	7.551
Beban Pemeliharaan	635,638,422	771,718,432	(13	i33)
Beban Perjalanan Dinas	409,343,274	388,362,722	:	402
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0		



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (119724) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SERANG

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:33 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	548,183,038	511,115,384	37,067,654	7.252
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,073,976,034	3,039,545,907	34,430,127	1.133
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	16,957,784,328	4,663,751,413	12,294,032,915	263.608
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	139,146,789	(139,146,789)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	139,146,789	(139,146,789)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	139,146,789	(139,146,789)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	16,957,784,328	4,802,898,202	12,154,886,126	253.074
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	16,957,784,328	4,802,898,202	12,154,886,126	253.074

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

SERANG, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SWASTIKO PURNOMO
NIP 197203181998031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (119724) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SERANG

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:34 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	19,136,360,175	17,958,428,452	1,177,931,723	6.56
SURPLUS/DEFISIT-LO	16,957,784,328	4,802,898,202	12,154,886,126	253.07
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(18,161,859,562)	(3,624,966,479)	(14,536,893,083)	401.02
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,204,075,234)	1,177,931,723	(2,382,006,957)	(202.22)
EKUITAS AKHIR	17,932,284,941	19,136,360,175	(1,204,075,234)	(6.29)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

SERANG, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SWASTIKO PURNOMO

NIP 197203181998031003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG 119724

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:34 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,400,683,000	20,888,518,967	13,487,835,967	282	6,922,752,000	6,930,033,811	(7,281,811)	100
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,400,683,000	20,888,518,967	13,487,835,967	282	6,922,752,000	6,930,033,811	(7,281,811)	100
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	7,400,683,000	20,888,518,967	13,487,835,967	282	6,922,752,000	6,930,033,811	(7,281,811)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,025,837,000	2,604,578,054	(421,258,946)	86	3,844,764,000	3,259,308,582	585,455,418	85
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,889,805,000	2,512,580,315	(377,224,685)	87	2,985,480,000	2,509,235,752	476,244,248	84
3. Belanja Modal	136,032,000	91,997,739	(44,034,261)	68	859,284,000	750,072,830	109,211,170	87
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG 119724

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 2:34 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,025,837,000	2,604,578,054	(421,258,946)	86	3,844,764,000	3,259,308,582	585,455,418	85
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

SERANG, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SWASTIKO PURNOMO
NIP 197203181998031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

**SATUAN KERJA : (119724) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SERANG**

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 2:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	59,995,265	0	59,995,265	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	372,660,991	13,641,277,501	(13,268,616,510)	(97.27)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	120,000	916,873,870	(916,753,870)	(99.99)
Persediaan	38,951,494	53,196,675	(14,245,181)	(26.78)
JUMLAH ASET LANCAR	471,727,750	14,611,348,046	(14,139,620,296)	(96.77)
ASET TETAP				
Tanah	10,200,000,000	10,200,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,047,949,778	4,845,576,339	202,373,439	4.18
Gedung dan Bangunan	8,020,872,402	8,020,872,402	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	13,580,000	13,580,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,447,458,498)	(4,899,275,460)	(548,183,038)	11.19
JUMLAH ASET TETAP	17,834,943,682	18,180,753,281	(345,809,599)	(1.90)
JUMLAH ASET	18,306,671,432	32,792,101,327	(14,485,429,895)	(44.17)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	374,386,491	13,655,741,152	(13,281,354,661)	(97.26)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	374,386,491	13,655,741,152	(13,281,354,661)	(97.26)
JUMLAH KEWAJIBAN	374,386,491	13,655,741,152	(13,281,354,661)	(97.26)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	17,932,284,941	19,136,360,175	(1,204,075,234)	(6.29)
JUMLAH EKUITAS	17,932,284,941	19,136,360,175	(1,204,075,234)	(6.29)
JUMLAH EKUITAS	17,932,284,941	19,136,360,175	(1,204,075,234)	(6.29)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,306,671,432	32,792,101,327	(14,485,429,895)	(44.17)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

SERANG, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SWASTIKO PURNOMO
NIP 197203181998031003



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (119724) KPKNL SERANG

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBP		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak

	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-Rp	98.670.049	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak

2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	-	-	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	-	-	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Ditandatangani secara elektronik Gunawan Sulistyo NIP. 19861222 201012 1007		Serang, 04 Mei 2026 Penelaah,  Ditandatangani secara elektronik Esra Tampubolon NIP. 199606192019022005		



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Serang
 No Dokumen : 001
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Belanja Barang yang Masih harus dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
V	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.725.500	-
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	-	1.725.500

Dibuat Oleh:
 Kasubbag Umum
 Gunawan Sulistyio
 NIP 198612222010121007

Disetujui Oleh:
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Swastiko Purnomo
 NIP 197203181998031003

Direkam Oleh:
 Operator GLP
 Esra Tampubolon
 NIP 199606192019022005



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : KPKNL Serang
 No Dokumen : 002
 Tanggal : 31 Desember 2025 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Pendapatan Yang Masih Harus diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
v	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	120.000	-
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	-	120.000

Dibuat Oleh:
 Kasubbag Umum
 Gunawan Sulistyo
 NIP 19861222010121007

Disetujui Oleh:
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Swastiko Purnomo
 NIP 197203181998031003

Direkam Oleh:
 Operator GLP
 Esra Tampubolon
 NIP 199606192019022005



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
 Tanggal 31 Desember 2025

